

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,**  
**PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

NOMOR PR.01.02.3.32.12.21.28 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR  
DAN ZAT ADIKTIF

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor Dan Zat Adiktif

Mayagustina Andarini

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF NOMOR PR.01.02.3.32.12.21.28 TAHUN 2021 TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2020-2024.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dalam rangka mendukung pencapaian program-program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka perlu melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif;

2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024;

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

## **BAB II**

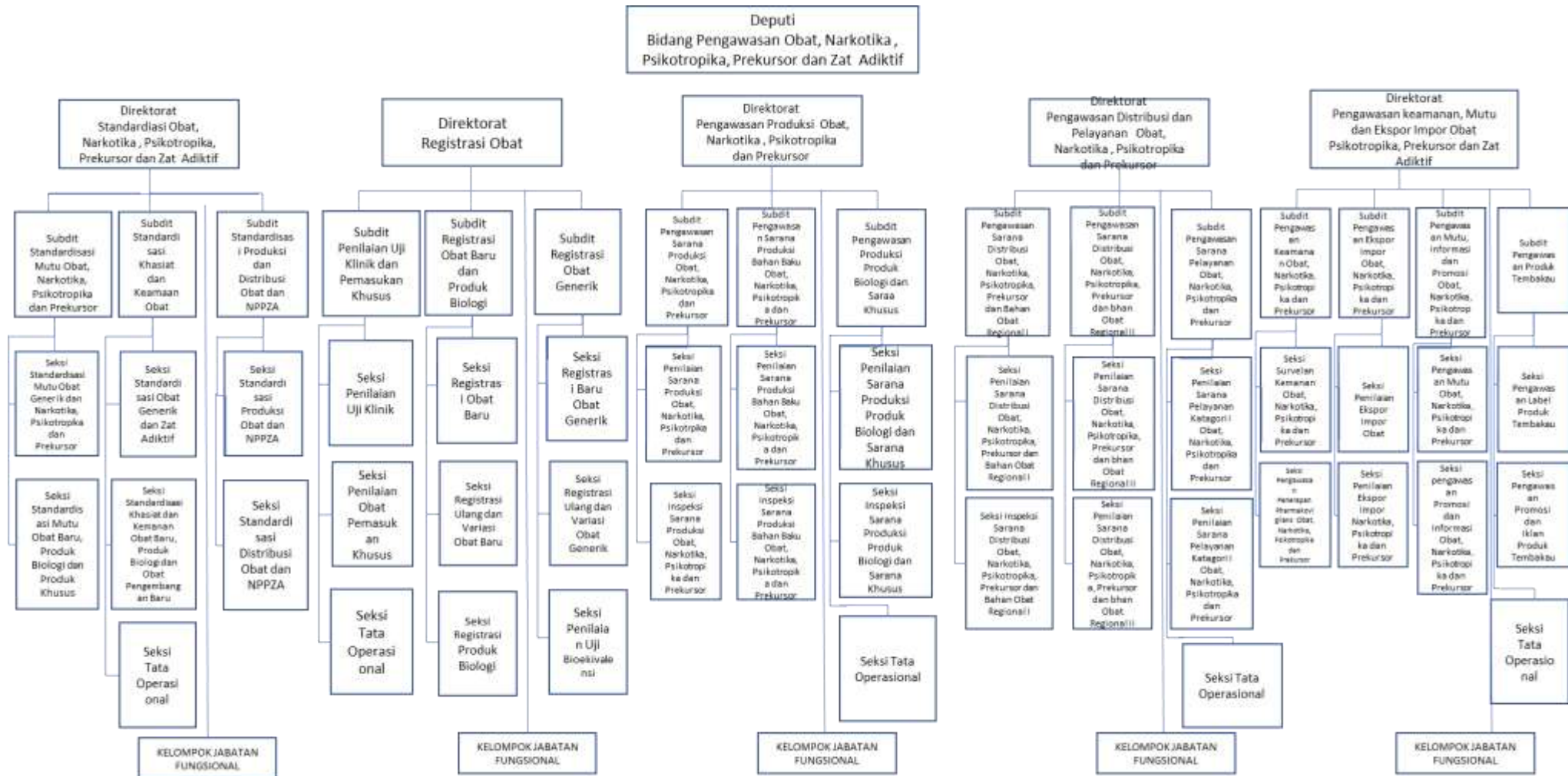
### **HASIL REVIU RENCANA STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

#### **A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN**

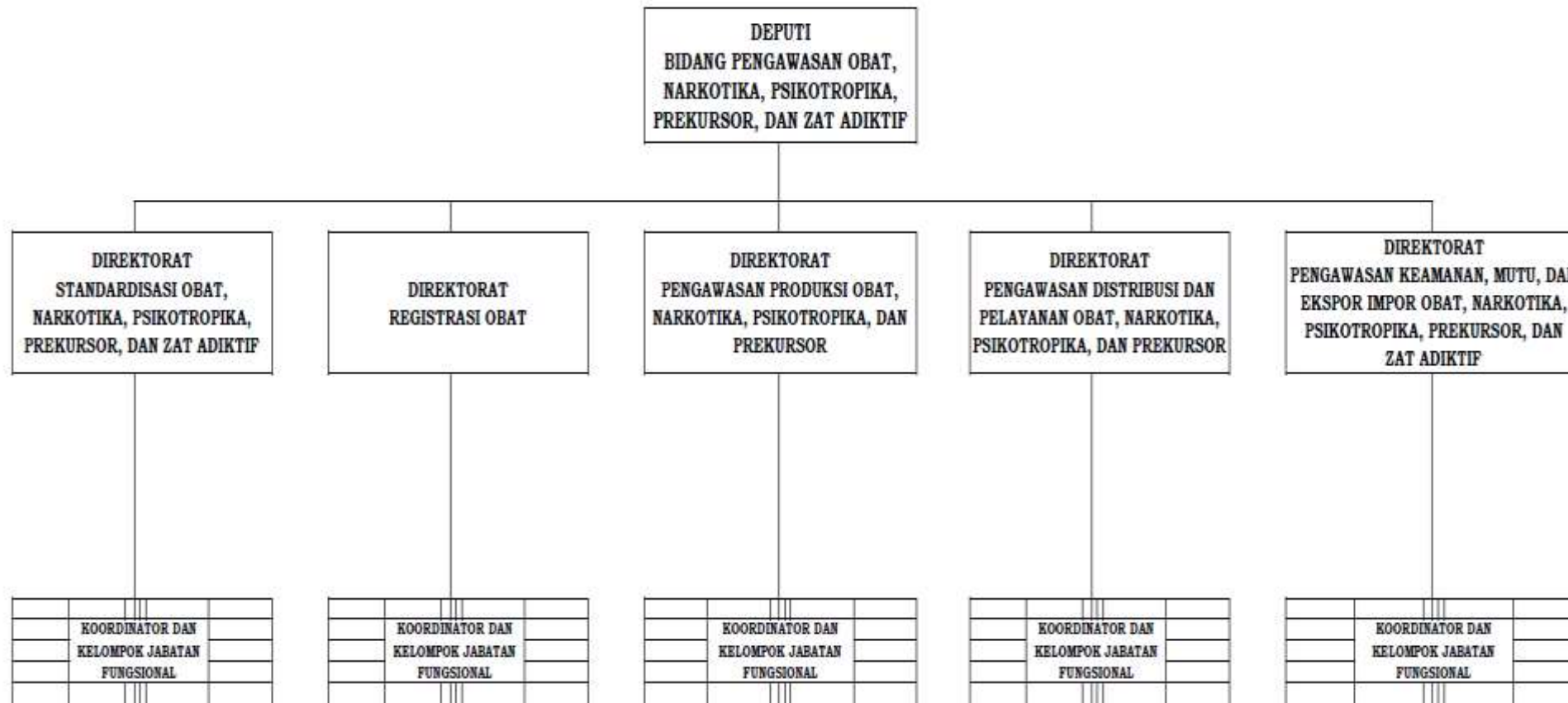
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM.

Perubahan organisasi dan tata kerja ini untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas khususnya di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Hal ini juga diperlukan karena organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud sebagaimana dalam gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2 . Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

## 2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020-2024, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 499 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif per Desember 2021 sejumlah 280 orang dengan proporsi 85,35 % (239 orang) perempuan dan 14.64% (41 orang) laki-laki yang tersebar di lima (5) Direktorat. Jumlah SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara optimal.

Pada 2021 dilakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan mempertimbangkan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenjang karir fungsional. Dari hasil perhitungan ABK ini didapatkan bahwa kebutuhan SDM di Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sejumlah 512 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 232 pegawai. Rincian kebutuhan pegawai di setiap unit kerja eselon II tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2020

	Deputi I	Direktorat Standardisasi ONPPZA	Direktorat Registrasi Obat	Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor ONPPZA
<b>Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2020)</b>	<b>512</b>	71	162	77	88	114
<b>Jumlah pegawai saat ini (Bezetting)</b>	<b>280</b>	34	95	47	45	59
<b>Kekurangan SDM</b>	<b>232</b>	37	67	30	43	55

\*) ABK Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2021 = 512 Orang;  
 Bazzeting Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif = 280 Orang;  
 Kekurangan SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif = 232 Orang

Tabel 2. Tingkat pendidikan pegawai di Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tingkat Pendidikan	Deputi I	Direktorat Standardisasi ONPPZA	Direktorat Registrasi Obat	Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor ONPPZA
Non Sarjana	22	3	4	7	2	6
S1	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
Profesi Apoteker	145	18	47	26	25	29
S2	68	8	35	8	3	14
S3	1	0	1	0	0	0
Jumlah	<b>280</b>	<b>34</b>	<b>95</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>59</b>

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebanyak 145 orang (51,78%) berpendidikan profesi (apoteker, dokter, dokter gigi, dokter hewan), 44 orang (15,71%) berpendidikan S1, 68 orang (24,29%) berpendidikan S2, dan hanya 1 orang (0,36%) yang berpendidikan S3. Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana relatif kecil yaitu sebanyak 22 orang (7,86%).

Tabel 3. Data pegawai di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin	Deputi I	Direktorat Standardisasi ONPPZA	Direktorat Registrasi Obat	Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor ONPPZA
Laki-Laki	<b>41</b>	3	8	11	12	7
Perempuan	<b>239</b>	31	87	36	33	52
Jumlah	<b>280</b>	<b>34</b>	<b>95</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>59</b>

Tabel 3 terlihat bahwa pegawai perempuan masih mendominasi di semua unit eselon II di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Kondisi ini diharapkan tidak membuat kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif karena semua pegawai baik laki-laki dan perempuan semuanya harus memenuhi kompetensi minimal di masing-masing jenjang jabatan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks dimasa pandemi dan potensi pengawasan obat dan vaksin, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Pada tahun 2021-2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Pegawai tahun 2020-2024, pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola

karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi BPOM yang sejalan dengan visi misi Presiden.

### 3. Capaian Kinerja 2020

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahunan	Realisasi	Capaian terhadap target tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
<i>Stakeholder perspective</i>						
SP1	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	85,72	107,15	107,15
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1%	97,84 %	109,81	109,81
<b>Capaian SP1</b>					<b>108,48</b>	<b>108,48</b>
SP2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	84,5	79,92	94,58	94,58
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	76,5	79,08	103,37	103,37
		Indeks kepatuhan industri produk	46	45,13	98,11	98,11

		tembakau dalam label dan iklan				
<b>Capaian SP2</b>					98,69	98,69
<b>SP3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat</b>	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5	85,14	103,20	103,20
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72	75,12	104,33	104,33
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5	85,21	102,05	102,05
<b>Capaian SP3</b>					103,19	103,19
<b>Capaian Stakeholder Perspective</b>					103,45	103,45
<b>Internal Process Perspective</b>						
<b>SP4</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat</b>	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	89,46	126	120

<b>Capaian SP4</b>					126	120
<b>SP5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat</b>	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77%	74,68 %	96,99	96,99
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,41	3,98	116,72	116,72
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82%	84,71 %	103,31	103,31
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	90,59	103,77	103,77
<b>Capaian SP5</b>					105,20	105,20
<b>SP6</b>	<b>Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat</b>	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	60	61,11	101,85	101,85
<b>Capaian SP6</b>					101,85	101,85
<b>Capaian NPS Internal Process Perspective</b>					111,02	109,02
<b><i>Learning and Growth Perspective</i></b>						
<b>SP7</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan</b>	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan	83	79,32	95,57	95,57

	<b>Obat, NAPPZA</b>	Zat Adiktif				
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	77,18	95,28	95,28
<b>Capaian SP7</b>					95,43	95,43
<b>SP8</b>	<b>Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA yang berkinerja optimal</b>	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77	83,40	108,31	108,31
<b>Capaian SP8</b>					108,31	108,31
<b>SP9</b>	<b>Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat</b>	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1,51	0,25	16,56	16,56
<b>Capaian SP9</b>					16,56	16,56
<b>SP10</b>	<b>Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA</b>	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,2	95,82	102,81	102,81

		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (efisien)	100% (efisien)	100% (efisien)	100% (efisien)
<b>Capaian SP10</b>					101,41	101,41
<b>Capaian NPS Learning and Growth Perspective</b>					80,43	80,43
<b>NPS Total</b>					98,30	97,63

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 3, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BPOM selain adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BPOM dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkaitan dengan sasaran program Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat (SP8), dengan capaian hanya sebesar 16,56% (kategori Sangat Kurang) dari target indeks yang ditetapkan 1,51. Upaya penguatan pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif akan terus dilakukan terutamanya dengan peningkatan penggunaan email corporate BPOM dan pengelolaan data berbasis elektronik, salah satunya ialah pemanfaatan *Business Operation Centre* (BOC) baik untuk pelaporan kinerja maupun pemantauan ketersediaan obat untuk penanganan COVID-19 yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui sistem e-Was.

Berkaitan dengan indikator kinerja Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar, perlu untuk pertimbangan dilakukan perbaikan untuk nomenklatur yang mencantumkan inovasi obat, mengingat terdapat irisan terhadap tugas dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), salah

satunya dimandatkan untuk mengawal pengembangan inovasi obat dalam rangka kemandirian obat di Indonesia.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks diatas, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain:

1. Simplifikasi dan percepatan registrasi obat termasuk vaksin, NIE diberikan dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*. Evaluasi pendaftaran khusus obat COVID-19 (5 hari kerja) dilakukan lebih cepat dibanding obat non COVID-19 (150 hari kerja).
2. Mengawal pengembangan vaksin COVID-19 serta keamanan dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan selama di peredaran, antara lain pengawalan dan evaluasi uji praklinik dan uji klinik, inspeksi sarana produksi dan pengawasan sarana distribusi.
3. Penyusunan dan penerbitan Pedoman Pelayanan Publik di Bidang Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan akses obat dan memenuhi ketersediaan obat di dalam negeri dengan Percepatan Perizinan di bidang obat.

#### 4. Potensi dan Permasalahan

Dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020-2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

##### a. Pandemi COVID-19

###### Potensi:

Peran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat COVID-19 untuk mengawal keamanan, khasiat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, BPOM

berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin COVID-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin COVID-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *timeline* registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
- 2) Koordinasi dengan peneliti/*stakeholder* terkait dalam pengembangan obat dan vaksin COVID-19 yang belum optimal.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan untuk penyembuhan COVID-19 sehingga perlu peran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* untuk obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dalam Reformasi SKN, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”** Kontribusi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat.
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin dan produk biologi bersertifikat halal. Pada area ini Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekursor, dan Zat Adiktif dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi melalui percepatan pengembangan dengan pendampingan penelitian dan uji klinik.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri serta masih kurangnya dukungan pemerintah dalam pemanfaatan obat, bahan baku obat dan produk biologi hasil produksi dalam negeri.
- 3) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

**B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan** Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPOM, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi BPOM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 5. Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024

Visi 2020-2024	Obat aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
----------------	--

Misi 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat serta penindakan kejahatan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li> <li>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat.</li> </ol>
Tujuan 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta lintas sektor dan masyarakat dalam Pengawasan Obat.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat.</li> <li>3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat serta kemandirian Industri Obat Nasional.</li> <li>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat yang beredar aman dan bermutu.</li> <li>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat.</li> <li>6. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> </ol>

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024 yaitu perubahan target untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5. Matriks Pemetaan Visi, Misi, Sasaran Program, dan Indikator 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	1. Indeks Kepatuhan pelaku usaha ( <i>compliance index</i> ) di bidang obat 2. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap keamanan dan mutu obat 3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat.	1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN	Peningkatan kapasitas SDM ke deputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dan pemangku kepentingan.	Penguatan pengelolaan SDM sarana/prasana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

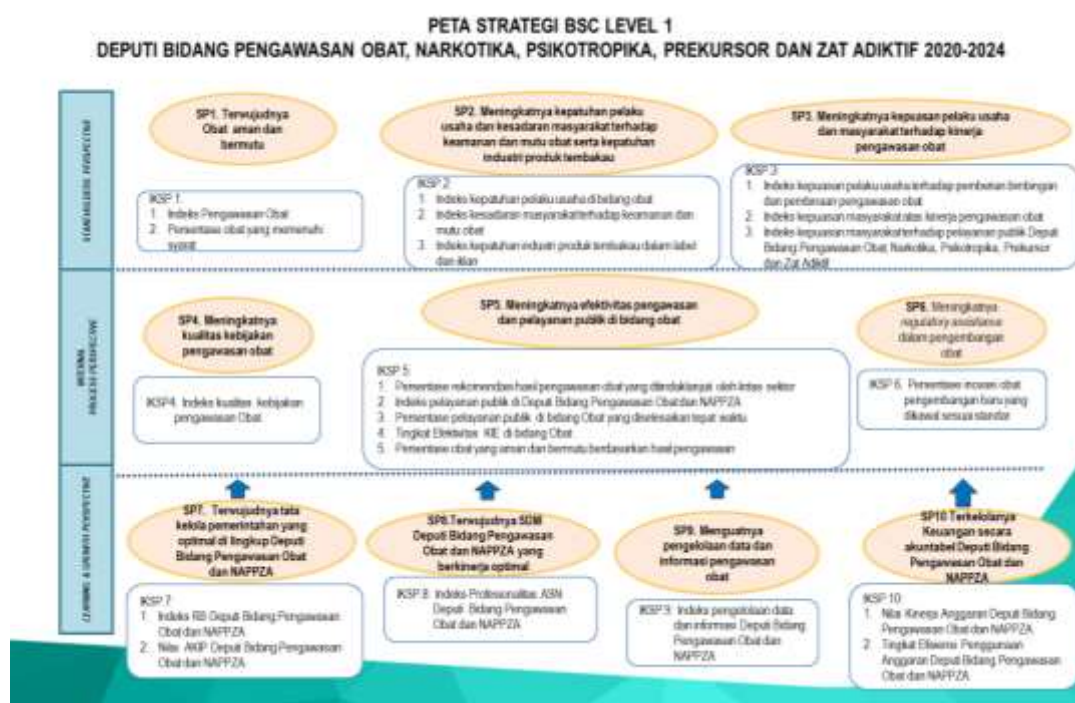
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Obat	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
		2. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	1. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>Postmarket</i> Obat	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>		<p>2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat</p>	<p>1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</p> <p>3. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</p> <p>4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>5. Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat</p>		<p>fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p>
		<p>3. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat</p>	<p>1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama yang optimal.	1. Indeks RB 2. Nilai AKIP	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		

a. Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama BPOM Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPOM. Terdapat penambahan indikator presentase obat yang aman dan bermutu pada level internal proses. Dilakukan juga penyesuaian terhadap target kinerja IKU Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang akan dijelaskan lebih rinci dalam Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020-2024

b. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA

Terdapat perubahan peta strategi Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA Tahun 2020-2024. Dilakukan penghapusan terhadap SK-2 yaitu "Tersedianya identifikasi kebutuhan

standar ONPPZA” dengan IKK-2 yaitu “Persentase kesesuaian tahapan penyusunan perencanaan standar ONPPZA sesuai roadmap”. Hal ini dilakukan karena SK dan IKK tersebut sudah terakomodir pada pengukuran SK-1 yaitu “Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat” yang salah satu komponen penilaiannya sudah mengukur proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan standar Obat NAPPZA sesuai dengan perencanaan/roadmap yang telah disusun sebelumnya.

Selain itu terdapat perubahan pada target tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat

Perubahan terhadap indikator Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat menyesuaikan dengan perubahan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi I.

2) Persentase sosialisasi standar ONAPPZA kepada stakeholders yang efektif (IKK 4)

Perubahan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan yang menilai bahwa pengukuran capaian indikator yang menggunakan data capaian pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan Teknis (IKEPU) kurang tepat mengingat pada Peta Strategi Level I, IKEPU berada pada posisi *Stakeholder Perspective*, sedangkan IKK 4 pada Peta Strategi Level 2 ini berada pada posisi *Internal Process*.

Biro Perencanaan dan Keuangan memberikan rekomendasi dalam pengukuran tersebut dengan menggunakan beberapa komponen/variabel pada pengukuran IKEPU sehingga dapat dibuat definisi operasional yang berbeda dengan IKEPU dan dapat dijadikan sebagai definisi operasional yang baru pada IKK4. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan *exercise* sehingga diperoleh usulan target capaian untuk IKK4 untuk periode 2020–2024 secara berurutan: 87, 88, 89, 90, 91 dengan pengukuran capaian indikator pada akhir tahun.

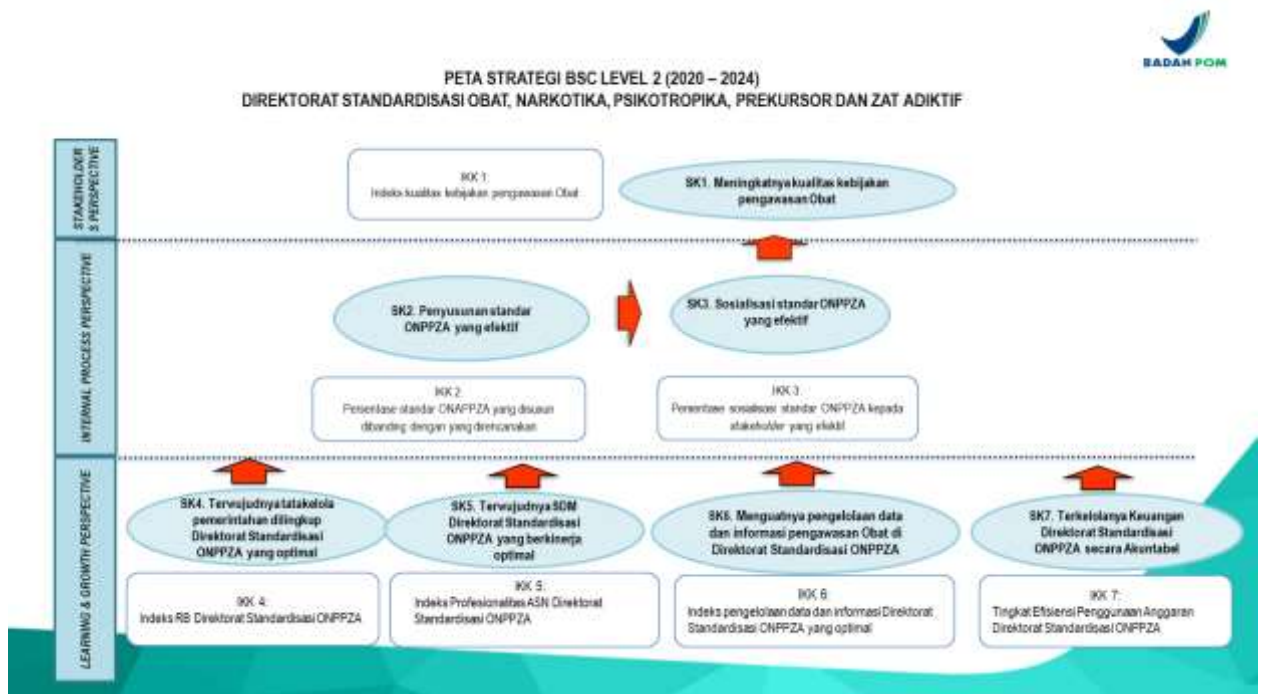
3) Indeks RB Direktorat Standardisasi ONAPPZA

Perubahan terhadap indikator Indeks RB Direktorat Standardisasi ONAPPZA menyesuaikan dengan perubahan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi I.

4) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA

Perubahan terhadap indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA menyesuaikan dengan perubahan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi I.

Adapun SK dan IKK Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Strategi Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA 2020-2024

c. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

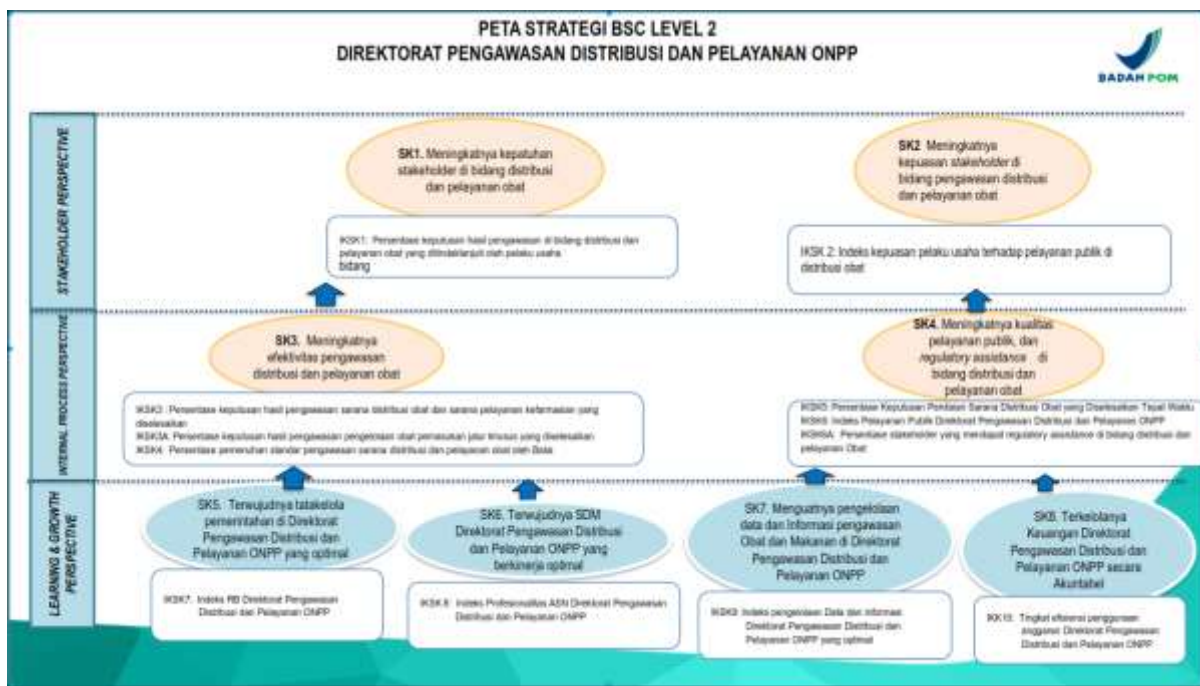
Terdapat perubahan peta strategi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP Tahun 2020-2024.

Dilakukan penambahan IKK pada SK-3 “Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat” yaitu IKK-3A “Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan”.

Selain itu terdapat perubahan redaksional pada SK-4 yang semula “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang distribusi dan pelayanan obat” menjadi “Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan *regulatory assistance* di bidang distribusi dan pelayanan obat”. Pada SK-4 tersebut dilakukan penambahan IKK-6A yaitu “Persentase stakeholder yang mendapat *regulatory assistance* di bidang distribusi dan pelayanan Obat”

Perubahan serta penambahan IKK pada SK-3 dan SK-4 dikarenakan adanya penyesuaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang disebabkan adanya perubahan SOTK unit kerja pada tahun 2021.

Adapun SK dan IKK Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebagai berikut:

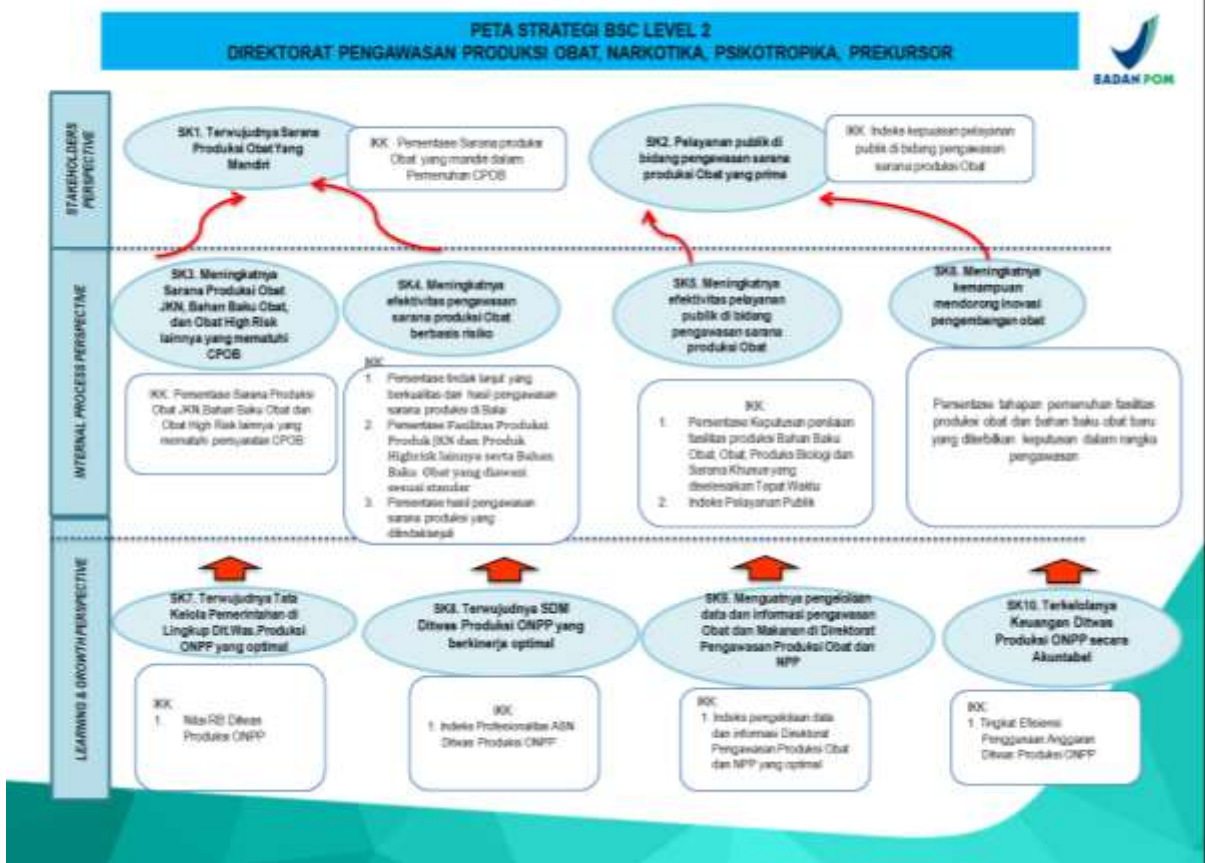


Gambar 5. Peta Strategi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP 2020-2024

- d. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

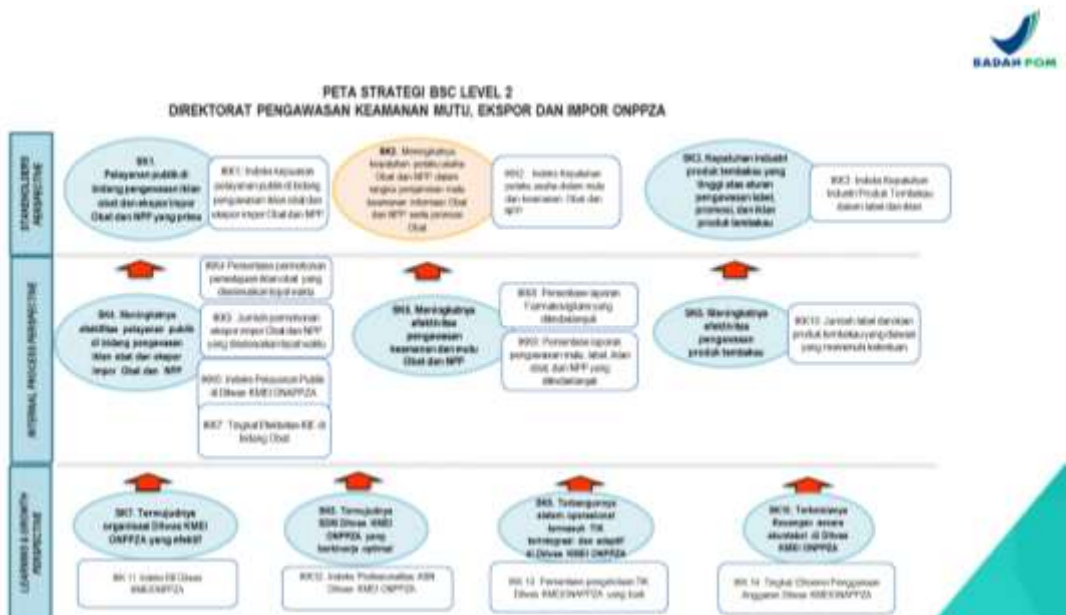
Terdapat perubahan peta strategi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika Psikotropika dan Prekursor yang memuat sasaran dan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024. Terdapat perubahan nomenklatur pada Indikator kinerja kegiatan **semula** “Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat” **menjadi** “Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan”. Hal tersebut karena untuk menghindari persepsi tumpang tindih antara kegiatan di BPOM dengan tugas dan fungsi BRIN, serta untuk lebih menggambarkan tugas dan fungsi BPOM sebenarnya.

Adapun SK dan IKK Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi sebagai berikut:



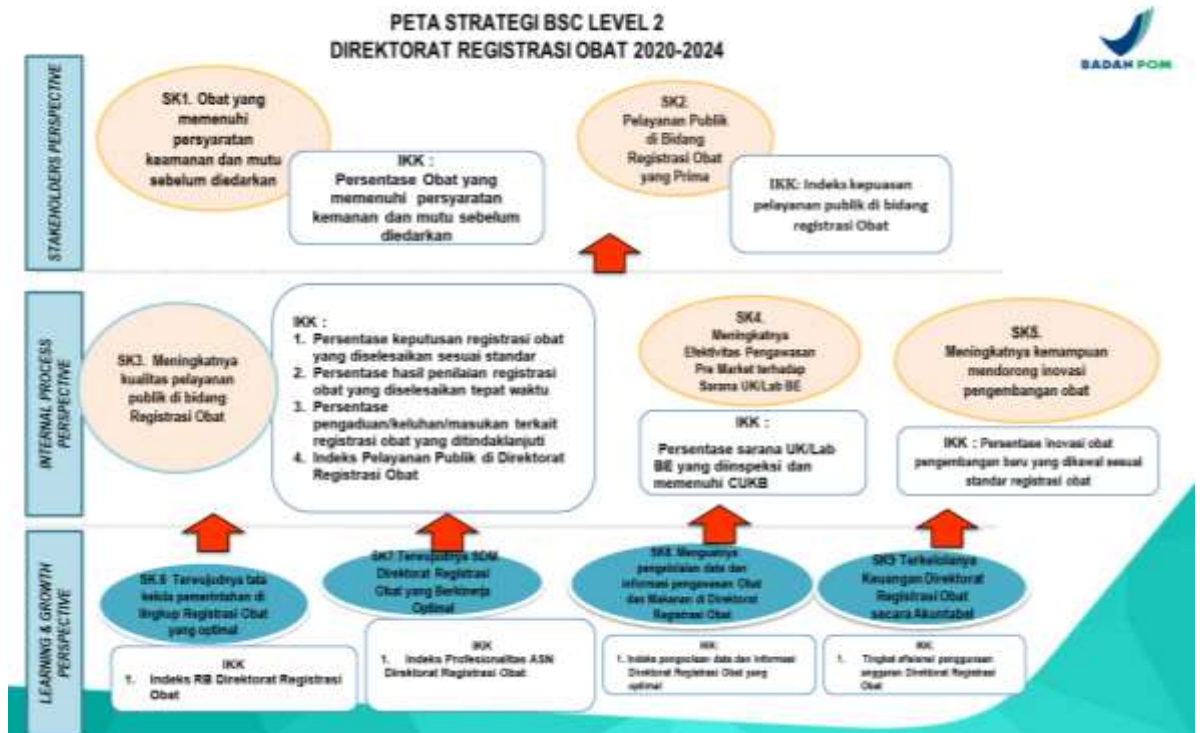
Gambar 6. Peta Strategi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

e. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NAPPZA



Gambar 7. Peta Strategi Direktorat Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NAPPZA

f. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Registrasi Obat



Gambar 8. Peta Strategi Direktorat Direktorat Registrasi Obat

C. **Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

a. Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, sebagai berikut:

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan arah kebijakan

Arah Kebijakan (Semula)	Arah kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat.	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap <b>pelaku usaha dan Lembaga penelitian</b> dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan fasilitasi industri dalam

Arah Kebijakan (Semula)	Arah kebijakan (Menjadi)
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat.	rangka peningkatan daya saing Obat.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat.
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
	6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat

b. Strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif masih relevan sesuai yang tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020-2024 sebagai upaya pencapaian indikator sesuai arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan obat.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

c. Kerangka Regulasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Terkait Kerangka Regulasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif selain mengacu pada kerangka regulasi pada Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020- 2024 juga melakukan update regulasi dan penyesuaian dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan pre

dan post market obat selama masa pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi COVID-19 perlu adanya peraturan yang memberikan peningkatan kemudahan dalam berusaha melalui penyederhanaan persyaratan dan relaksasi lainnya serta upaya terobosan dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan vaksin COVID-19. Telah dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan terkait pelaksanaan pengawasan pre market yaitu:

1. Registrasi obat dan vaksin COVID-19 yaitu pemberian *Emergency Use Authorization (EUA)*
2. Pedoman pelaksanaan pelayanan publik di masa pandemi
3. Infomatorium obat-obat dalam tatalaksana pengobatan COVID-19
4. Pedoman pengawasan distribusi obat dan vaksin COVID-19
5. Pedoman tentang pengawasan farmakovigilans

Beberapa peraturan yang dilakukan revisi untuk mengakomodir perubahan kebijakan selama masa pandemi COVID-19 antara lain

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2020 Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
  2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 461);
- b. Kerangka Kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Terkait Kerangka Kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020- 2024. Kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat.

#### **D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

1. Reviu terhadap Target Kinerja  
Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Target Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	81	82	83	84	85,72	91	92,25	93,5	94,75
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,1	91,1	93,1	95,1	97,1	97,84	95,5	96	96,5	97
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	79,92	87	88	89	91
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat yang aman dan bermutu	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	79,08	80	81,5	84	86
	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46	47	48	49	50	45,13	47	48	49	50
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	85,14	86	87	88	89
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat	72	75	77	80	85	72,12	77	80	83	86
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	85,21	87	88	89	90

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	68	71	75	78	81	89,46	89,6	89,7	89,9	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan						87,42	87,5	88,5	89,5	91
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77	78	79	80	81	74,68	78	79	80	81
	Persentase pelayanan publik dibidang obat yang diselesaikan tepat waktu	82	83	84	85	86	84,71	85	86	87	88
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,41	3,69	3,96	4,2 4	4,51	3,98	4,12	4,28	4,44	4,53
	Tingkat Efisiensi KIE di Bidang Obat	70	73	77	80	83	90,59	90,77	92,59	94,44	96,33

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	60	65	70	75	80	61,11	82	85	89	92
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83	87	91	92	93	79,32	86,7	88,3	89,9	91,5
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81	82	83	84	85	77,18	79,7	82,2	84,7	87,2
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	77	79	81	83	85	83,24	82,60	83,33	84,06	84,77
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NAPPZA	1,51	2	2,26	2,5	3	0.25	2	2,26	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	93,2	93,3	93,4	93,5	93, 6	95,82	93,3	93,4	93,5	93,6
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Perubahan target Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat pada tahun 2021 – 2024. Penilaian Kualitas Kebijakan di Kedeputian I yang dilakukan pada Tahun 2020 oleh Tim Evaluasi Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), diperoleh nilai realisasi sebesar 89,46 dengan kategori sangat baik sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 126% dibandingkan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil reviu oleh tim terhadap nilai capaian tersebut, dengan memperhatikan target nasional, kertas kerja penetapan target IKU BPOM, target kinerja BPOM dan cascading terhadap Unit Organisasi di bawahnya Tahun 2020-2024 serta realisasi target kinerja di Kedeputian I dalam hal ini Direktorat Standardisasi Obat, NAPPZA pada Tahun 2020, maka diperlukan penyesuaian target Sasaran Program tersebut pada Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum pada tabel 7.
- b. Perubahan target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- c. Perubahan target Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020, capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada rencana strategis sebelumnya. Sehingga terdapat penyesuaian (kenaikan) target pada tahun 2021-2024.
- d. Perubahan target Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar pada tahun 2021-2024. Berdasarkan realisasi tahun 2020 dan 2021 yang telah melebihi target pada tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target 2022 s.d 2024.
- e. Perubahan target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 – 2024.
- f. Perubahan target Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap

target di 2022 -2024. indikator ini didukung oleh target untuk penilaian unit pelayanan publik.

- g. Perubahan target Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar pada tahun 2021 – 2024. Capaian pada indikator ini didukung oleh indikator di unit Direktorat Registrasi Obat dan Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP. Capaian pada tahun 2020 sudah mencapai target di 2022 sehingga harus dilakukan penyesuaian target yang merupakan rata-rata dari target kedua unit tersebut.
- h. Perubahan target Indeks RB pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- i. Perubahan target Nilai AKIP pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- j. Perubahan target Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024.
- k. Perubahan target Nilai Kinerja Anggaran Deputi I pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan capaian tahun 2020 capaian sudah melebihi target pada tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target di 2022 -2024
- l. Perubahan target Sasaran Program Meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP. Indikator Jumlah Permohonan Ekspor Impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu dengan target TA 2021 adalah senilai 16.500, dengan pembagian target triwulan 1 sampai dengan 4 berturut-turut adalah : 4125 ; 8250; 12375 dan 16500. Sedangkan hasil capaian kinerja ONPP pada triwulan 1 periode Januari - Maret 2021 sudah mencapai 5049 Permohonan Ekspor Impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu dari target 4125 permohonan (atau persentase capaian kinerja = 122,4% ). Jika dilihat trend capaian permohonan Ekspor impor ONPP yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut : Tahun 2018 sejumlah 18.476 permohonan, tahun 2019 sejumlah 17.280 permohonan dan tahun 2020 sejumlah 18.550 permohonan.
- m. Penyesuaian target indikator kinerja Persentase Keputusan Hasil Pengawasan di Bidang Distribusi dan Pelayanan Obat yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha; Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi; dan Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan dan Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021-2024, dengan memperhatikan capaian 2020 yang sudah melebihi target maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target 2021-2024 sebagaimana tercantum pada tabel 7.

2. Program dan Kegiatan

Tidak ada perubahan pada program dan kegiatan di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

3. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA tahun 2020-2024:

Tabel 1. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020-2024

No	Kegiatan	Sumber Dana	Realisasi (Rp Juta)		Alokasi (Rp Juta)		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	RM	6.364	7.218	8.468	10.100,4	11.187,4
		PNBP	0.765	0,764	831	765,6	765,6
		<b>Total</b>	<b>6.101</b>	<b>7.982</b>	<b>9.299</b>	<b>10.866</b>	<b>11.953</b>
2	Registrasi Obat	RM	1.664	2.048	5.519	4.476	4.924
		PNBP	5.917	6.152	6.090	8.131	8.944
		<b>Total</b>	<b>7.581</b>	<b>8.210</b>	<b>11.610</b>	<b>12.607</b>	<b>13.868</b>
3	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	RM	4.348	4.453	8.960	10.860	11.153
		PNBP	2.088	2.156	2.346	2.346	2.346
		<b>Total</b>	<b>6.525</b>	<b>6.609</b>	<b>11.306</b>	<b>13.206</b>	<b>13.499</b>
4	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	RM	5.141	3.962	6.492	10.421,5	11.679,5
		PNBP	2.458	2.157	1.660	2.160,5	2.160,5
		<b>Total</b>	<b>7.599</b>	<b>6.119</b>	<b>8.153</b>	<b>12.582</b>	<b>13.840</b>
5	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	RM	5.477	4.892	9.417	9.282	10.445
		PNBP	1.881	2.585	2.543	2.341	2.341
		<b>Total</b>	<b>7.358</b>	<b>7.477</b>	<b>11.960</b>	<b>11.623</b>	<b>12.786</b>
<b>TOTAL</b>					<b>58.675</b>	<b>64.544</b>	

TABEL 9. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT NAPPZA TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI									
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Pro PN
			2020	2021	2022	2023	2024				Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>							<b>Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>									
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat							Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat								
	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	76	81	85	90	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,46	89,6	89,7	89,9	90		
	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar ONPPZA							Dihapus								
	1	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar ONPPZA sesuai roadmap	80	83	85	88	90	Dihapus								
	Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif							Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif								
	1	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	92	92	93	94	95	1	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	87	88	89	90	91		

SEMULA							MENJADI							
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Pro PN
	Penyusunan standar ONPPZA yang efektif							Penyusunan standar ONPPZA yang efektif						
	Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	92	92	93	94	95		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	86,27	88	89	90	91	
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal							Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal						
	1 Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	85	89	93	94	95		1 Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	72,63	85,3	87,3	89,3	91,3	
	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang berkinerja optimal							Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang berkinerja optimal						
	1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	75	77	80	82	85		1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	80,57	81	82	83	84	
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA							Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA						
	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	1,51	2,00	2,25	2,50	3,00		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	0	2,00	2,25	2,50	3,00	
	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel							Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel						
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	100	100	100	100		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	100	100	100	100	

SEMULA							MENJADI									
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Pro PN		
<b>Registrasi Obat</b>							<b>Registrasi Obat</b>									
	Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan							Obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan								
	1	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70	73	76	79	82		1	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	88,53	88,5	89	89,5	90	
	Pelayanan Publik di Bidang Registrasi Obat yang Prima								Pelayanan Publik di Bidang Registrasi Obat yang Prima							
	1	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	82	84.5	87	89	92		1	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	82	85	86	87	88	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat								Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang Registrasi Obat							
	1	<i>Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar</i>	63	66	69	72	75		1	<i>Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar</i>	74,90	75	76	77	78	<i>Pro PN</i>
	2	Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70	73	76	79	82		2	Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70	73	76	79	<b>82</b>	
	3	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		3	Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	

SEMULA								MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Pro PN		
	4	.Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	3,51	3.76	4.01	4.26	4.51		4	.Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	3,51	4.01	4,20	4.40	4.51	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pre Market terhadap Sarana UK/Lab BE								Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pre Market terhadap Sarana UK/Lab BE							
	1	Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78%	81%	84%	87%	90%		1	Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78%	81%	84%	87%	<b>90%</b>	
	Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat								Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat							
	1	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	100	100	100	100		1	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	100	100	100	100	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Registrasi Obat yang optimal								Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Registrasi Obat yang optimal							
	1	Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88	90	93	94	95		1	Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88	86,1	88.1	90,1	92,1	
	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat yang Berkinerja Optimal								.Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Obat yang Berkinerja Optimal							
	1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	76	77	80	82	85		1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	76	88,5	88.9	89,3	89,6	

SEMULA								MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Pro PN
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Obat								Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Obat							
		Indeks pengeolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	1,51	2,00	2,25	2,50	3,00	1,51	1	Indeks pengeolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	1,51	2,00	2,25	2,50	3,00	
	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Obat secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Obat secara Akuntabel							
	1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	92	93	94	95	96	1	1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	92	93	94	95	96	
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor								Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor								
	<i>Terwujudnya sarana produksi obat yang mandiri</i>								<i>Terwujudnya sarana produksi obat yang mandiri</i>							
	1	<i>Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB</i>	50	55	60	65	70	1	1	<i>Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB</i>	53,33	55	60	65	70	
	<i>Pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat yang prima</i>								<i>Pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat yang prima</i>							
	1	<i>Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat</i>	85	86,5	88	90	92	1	1	<i>Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat</i>	85,16	87	88	89	90	

SEMULA							MENJADI							
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Pro PN
	Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi CPOB							Meningkatnya Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat, dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi CPOB						
	1 Persentase Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	72	74	76	78	80		1 Persentase Sarana Produksi Obat JKN, Bahan Baku Obat dan Obat High Risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	82,26	74	76	78	80	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko							Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi Obat berbasis risiko						
	1 Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	90	95	95	100	100		1 Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	88,9	95	95	100	100	
	2 Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84	86	88	90	92		2 Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	88,94	86	90	91	92	Pro PN
	3 Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	72	74	76	78	80		3 Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	83,07	74	76	78	80	
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat							Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi Obat						
	1 Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produk Biologi dan Sarana	65	70	75	80	85		1 Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produk Biologi dan Sarana	73,08	70	75	80	85	

SEMULA								MENJADI							
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Pro PN	
	<i>Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</i>								<i>Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</i>						
	2 Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51		2 Indeks Pelayanan Publik	3,89	3,76	4,01	4,26	4,51		
	<i>Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat</i>							<i>Meningkatnya kemampuan mendorong inovasi pengembangan obat</i>							
	1 <i>Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat (*)</i>	60	65	-	-	-		1 <i>Persentase tahapan pemenuhan fasilitas-produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan (**)</i>	61,11	-	70	75	85		
	<i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Dit. Was. Produksi ONPP yang optimal</i>							<i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Dit. Was. Produksi ONPP yang optimal</i>							
	1 <i>Nilai RB Ditwas Produksi ONPP</i>	85	89	93	94	95		1 <i>Nilai RB Ditwas Produksi ONPP</i>	78,38	89	93	94	95		
	<i>Terwujudnya SDM Ditwas Produksi ONPP yang berkinerja optimal</i>							<i>Terwujudnya SDM Ditwas Produksi ONPP yang berkinerja optimal</i>							

SEMULA								MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Pro PN		
	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	75	77	80	82	85		1	Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	87,4	77	80	82	85	
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP								Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP							
	1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	1	2	2,26	2,5	3	
	Terkelolanya Keuangan Ditwas Produksi ONPP secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Ditwas Produksi ONPP secara Akuntabel							
	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	95	95	95	95		1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	100	95	95	95	95	
<b>Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor</b>								<b>Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor</b>								
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Distribusi dan Pelayanan Obat								Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Distribusi dan Pelayanan Obat							
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	70	72	74	76	78		1	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	74,68	75	77	79	81	

SEMULA							MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Pro PN	
	Meningkatnya kepuasan stakeholder di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat							Meningkatnya kepuasan stakeholder di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat							
	1	Indeks kepuasan pelkai usaha terhadap pelayanan publik distribusi obat	87,5	89	90	91	92	1	Indeks kepuasan pelkai usaha terhadap pelayanan publik distribusi obat	88,01	89	90	91	92	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat							Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat							
	1	<i>Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan</i>	80	81	82	83	84	1	<i>Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan</i>	85,24	85	86	87	88	<i>Pro PN</i>
	2	<i>Prosentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obatpemasukan jalur khusus yang diselesaikan</i>	-	-	82	83	84	2	<i>Prosentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obatpemasukan jalur khusus yang diselesaikan</i>	-	-	86	87	88	
	3	<i>Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai</i>	65	66	67	68	69	3	<i>Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai</i>	76,26	79	80	81	82	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang distribusi obat							Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang distribusi obat							

SEMULA								MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Pro PN		
	1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	78	80	82	84	86		1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	84,07	84	86	88	90	Pro PN
	2	Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	3,51	4,01	4,20	4,40	4,51		2	Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	3,9	4,01	4,20	4,40	4,51	
	3	Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	-	-	75	80	85		3	Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	-	-	75	80	85	
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP							
	1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	90	91	93	94	95		1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	76,37	91	93	94	95	
	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal							
	1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	75	77	80	82	85		1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	77,76	77	80	82	85	
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP								Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP							
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	1,51	2,0	2,26	2,5	3		1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	0,25	2,0	2,26	2,5	3	

SEMULA								MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Pro PN
	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP								Terkelolanya Keuangan secara akuntabel di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP							
	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	88	88	88	88		1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	99,69	88	88	88	88	
<b>Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>								<b>Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>								
	Pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP yang prima								Pelayanan publik di bidang pengawasan iklan Obat dan Ekspor Impor Obat dan NPP yang prima							
	1	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	85	86,5	88	90	92		1	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	85,3	87	88	89	90	
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi obat								Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan NPP dalam rangka penjaminan mutu keamanan informasi Obat dan NPP serta promosi obat							
	1	Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	93	93,5	94	94,5	95		1	Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	86	86,5	87	87,5	88	
	Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi terhadap aturan terkait label, promosi, dan iklan produk tembakau								Kepatuhan industri produk tembakau yang tinggi terhadap aturan pengawasan label, promosi, dan iklan produk tembakau							
	1	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam iklan dan label	46	47	48	49	50		1	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	45,13	47	48	49	50	

SEMULA								MENJADI								
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target					Pro PN
	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP								Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor Obat dan NPP							
	1	Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51		1	Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,33	4,45	4,51	4,55	4,60	
	2	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16300	16500	16700	16900	17100		2	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18550	18000	18100	18200	18200	Pro-PN
	3	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70	72	74	76	78		3	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	97,76	72	74	76	78	
	4	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat							4	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	90,41	90,77	92,59	94,44	96,33	
	<b>Meningkatnya efektifitas pengawasan keamanan dan mutu Obat dan NPP</b>								<b>Meningkatnya efektifitas pengawasan keamanan dan mutu Obat dan NPP</b>							
	1	Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	70	70	70	70		1	Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	76,75	70	70	70	70	
	2	Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	86	86	87	87	88		2	Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	63,79	86	87	87	88	
	Meningkatnya efektifitas pengawasan produk tembakau								Meningkatnya efektifitas pengawasan produk tembakau							

SEMULA							MENJADI									
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Pro PN		
	1	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60000	60200	60400	60600	60800		1	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	59789	60200	60400	60600	60800	Pro-PN
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang							
	1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83	87	91	92	93		1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	88,77	87,4	88,4	89,4	90,4	
	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal							
	1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	75	77	80	82	85		1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77,74	78	79	80	81	
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif								Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif							
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	75	77	80	82	85		1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	0	2	2,25	2,5	3	

SEMULA								MENJADI							
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Pro PN	
	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel di Ditwas KMEI ONPPZA							Terkelolanya Keuangan secara akuntabel di Ditwas KMEI ONPPZA							
	1 <i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA</i>	98% (Efisien)	98% (Efisien)	98% (Efisien)	98% (Efisien)	98% (Efisien)		1 <i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA</i>	99,96% (Efisien)	98% (Efisien)	98% (Efisien)	98% (Efisien)	98% (Efisien)		

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### 1. Kesimpulan

- i. Reviu Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- ii. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

### 2. Rekomendasi

Hasil reviu Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyesuaikan juga dengan reviu terhadap Renstra BPOM. Reviu Renstra ini dilakukan untuk menyelaraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BPOM terutama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan agar memperhatikan hasil reviu Renstra tersebut. Selain itu, unit kerja di bawah Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif juga perlu melakukan penyesuaian dengan mengacu pada hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Melalui reviu Renstra ini, diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

Mayagustina Andarini